PENYUSUNAN ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

Erna Irawati S.Sos., M.Pol.Adm

Malang, 14 November 2018

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA RI
2018

POKOK BAHASAN

- CAPAIAN REFORMASI BIROKRASI;
- ROAD MAP DAN TANTANGAN RB
- DESAIN RANCANGAN RENCANA AKSI RB;
- KONTRIBUSI OPD DLM PENYUSUNAN ROAD MAP

CAPAIAN REFORMASI BIROKRASI;

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA & REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2016 DAN 2017

	2016	2018
INDEKS PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA MALANG	62,11 (B)	69,10 (B)
INDEKS REFORMASI BIROKRASI PMPRB PEMERINTAH KOTA MALANG (*self assesment*)	79,65	78,71

INTEGRITAS PROFESIONAL INOVATIF PEDULI

SKOR RB KOTA MALANG (berdasarkan Hasil Evaluasi Kemenpan dan RB)

No	Komponen Penilaian	Nilai Maks	2015		2016		2018	
			Nilai Capaian	% Capaian	Nilai Capaian	% Capaian	Nilai Capaian	% Capaian
A	Pengungkit							
1	Manajemen Perubahan	5.00	2,88	57.60%	2,90	58.00%	2,96	59,20%
2	Penataan Peraturan Perundangan-undangan	5.00	1,66	33.20%	2,09	41.80%	2,09	41,80%
3	**Penataan dan Penguatan Organisasi**	6.00	**2,49**	41.50%	**1,50**	25.00%	1,66	27,67%
4	Penataan Tatalaksana	5.00	3,17	63.40%	3,43	68.60%	3,60	72,00%
5	**Penataan Sistem Manajeman SDM**	15.00	**7,05**	47.00%	**7,06**	47.07%	11,66	77,73%
6	Penguatan Akuntabilitas	6.00	3,33	55.50%	3,58	59.67%	4,11	68,50%
7	Penguatan Pengawasan	12.00	4,89	40.75%	6,28	52.33%	6,26	52,17%
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	6.00	4,71	78.50%	4,95	82.50%	4,94	82,33%
	Sub Total Komponen Pengungkit (A)	60.00	**30,18**	**50.30%**	**31,79**	52.98%	**38,12**	**63,53%**
B	Hasil							
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja	14,00			8,67	61.93%	9,93	70,93%
2	Survei Internal Integritas Organisasi	6,00			4,95	82.50%	4,52	75,33%
3	Survei Eksternal Persepsi Korupsi	7,00			5,79	82.71%	5,83	83,29%
4	Opini BPK	3,00			3	100%	3,00	100,00%
5	Survei Ekternal Pelayanan Publik	10,00			7,91	79.10%	7,70	77,00%
	Sub Total Komponen Hasil (B)	40,00			30,32	75.80%	30,98	77,45%
	Indeks Reformasi Birokrasi (A + B)	100,00	**50,30**		**62,11**	62%	**69,10**	69,10%

TOTAL NILAI TINGKAT PEMENUHAN PELAKSANAAN RB PADA 8 AREA PERUBAHAN (hasil evaluasi Kemenpan dan RB)

2015 — **50,30** — rentang skor kualitas **"KURANG"**

2016 — **62,11** — rentang skor kualitas **"CUKUP"**

2018 — **69,10** — rentang skor kualitas **"CUKUP"**

No	Tingkat Pemenuhan	Rentang Skor Kualitas
1.	90 < s.d. ≤ 100	SANGAT BAIK
2.	75 < s.d. ≤ 90	BAIK
3.	60 < s.d. ≤ 75	CUKUP
4.	50 < s.d. ≤ 60	KURANG
5.	≤ 50	SANGAT KURANG

Rekomendasi FOKUS PERBAIKAN Renaksi RB KOTA MALANG

8 AREA PERUBAHAN

1. MANAJEMEN PERUBAHAN
2. PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
3. PENATAAN & PENGUATAN ORGANISASI
4. PENATAAN TATALAKSANA

TIM RB

SELURUH OPD
- Quick WIN
- RENAKSI RB

5. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM
6. PENGUATAN AKUNTABILITAS
7. PENGUATAN PENGAWASAN
8. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

INTEGRITAS PROFESIONAL INOVATIF PEDULI

DESAIN RANCANGAN RENCANA AKSI RB;

Dasar Hukum Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 17 TAHUN 2007

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL

TAHUN 2005 – 2025

UU No. 17 Tahun 2007

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005 - 2025

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 81 TAHUN 2010

GRAND DESIGN REFORMASI BIROKRASI 2010-2025

Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010

Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL

TAHUN 2015 - 2019

Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 20015 - 2019

PERATURAN MENTERI

PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11 TAHUN 2015

TENTANG

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI 2015-2019

Peraturan Menteri PANRB

Road Map Reformasi Birokrasi 2015 - 2019

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2014

TENTANG

APARATUR SIPIL NEGARA

UU No. 5 Tahun 2014

Aparatur Sipil Negara

UNDANG–UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 30 TAHUN 2014

TENTANG

ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

UU No.30 Tahun 2014

Administrasi Pemerintahan

Arah Kebijakan Reformasi Birokrasi

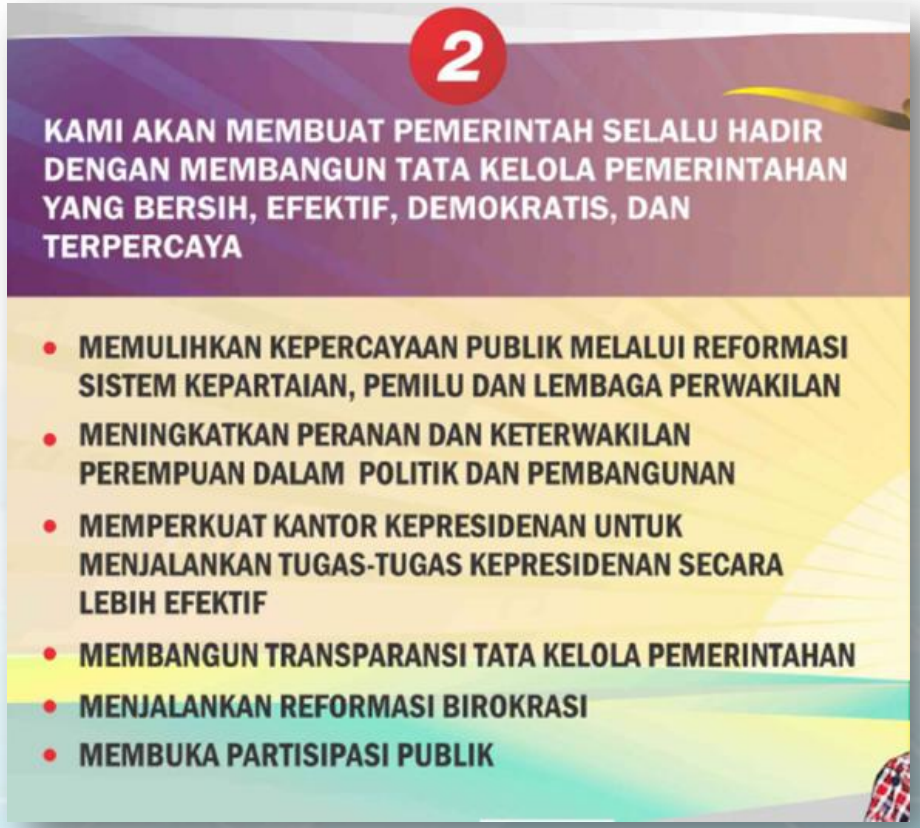

Arah Kebijakan Reformasi Birokrasi

NORMA PEMBANGUNAN KABINET KERJA

1) Membangun untuk manusia dan masyarakat;
2) Upaya peningkatan kesejahteran, kemakmuran, produktivitas tidak boleh menciptakan ketimpangan yang makin melebar. Perhatian khusus diberikan kepada peningkatan produktivitas rakyat lapisan menengah bawah, tanpa menghalangi, menghambat, mengecilkan dan mengurangi keleluasaan pelaku-pelaku besar untuk terus menjadi agen pertumbuhan;
3) Aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan keseimbangan ekosistem

3 DIMENSI PEMBANGUNAN

DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA
- Pendidikan
- Kesehatan
- Perumahan
- Mental / Karakter

DIMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN
- Kedaulatan Pangan
- Kedaulatan Energi & Ketenagalistrikan
- Kemaritiman dan Kelautan
- Pariwisata dan Industri

DIMENSI PEMERATAAN & KEWILAYAHAN
- Antarkelompok Pendapatan
- Antarwilayah: (1) Desa, (2) Pinggiran, (3) Luar Jawa, (4) Kawasan Timur

KONDISI PERLU
- Kepastian dan Penegakan Hukum
- Keamanan dan Ketertiban
- Politik & Demokrasi
- Tata Kelola & Reformasi Birokrasi

QUICK WINS DAN PROGRAM LANJUTAN LAINNYA

KERANGKA PELAKSANAAN/DELIVERY MECHANISM

Kerangka Pendanaan: APBN dan Non-APBN	Kerangka Regulasi	Kerangka Kelembagaan

Sumber:
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 - 2019

KEHADIRAN PEMERINTAHAN YANG BAIK MENJADI KUNCI KEBERHASILAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

Sasaran Reformasi Birokrasi

SASARAN REFORMASI BIROKRASI

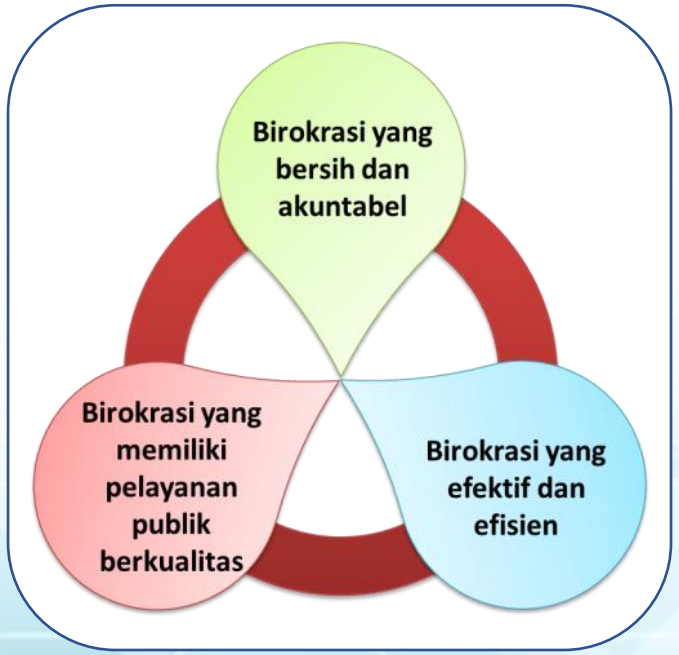

SASARAN REFORMASI BIROKRASI 2010 - 2014

- Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN
- Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi
- Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat

SASARAN REFORMASI BIROKRASI 2015 - 2019

- Birokrasi yang bersih dan akuntabel
- Birokrasi yang efektif dan efisien
- Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Tingkat Mikro (pada masing-masing instansi pemerintah)

Langkah-langkah Umum Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah

PRINSIP PENYUSUNAN ROAD MAP RB

Meneruskan dan Meningkatkan Langkah-langkah yang Sudah Baik

Menterjemahkan Prioritas Utama Pemerintah Baru

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

Memperkaya Dengan Isu-isu Strategis Baru

Mengoperasionalkan RPJMN 2015 - 2019

Memperbaiki/ Menyempurnakan Strategi Implementasi

LANGKAH-LANGKAH

1. Persiapan
2. Identifikasi Kondisi Umum
3. Penentuan Fokus Perubahan
4. Penyusunan Rencana Aksi
5. Penyusunan Dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi

Teknik Result Chain (Keterkaitan Hasil)

Definisi

Results chains (Keterkaitan hasil) adalah sebuah pendekatan yang menggambarkan sebuah keterkaitan tentang bagaimana kegiatan-kegiatan/aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh instansi pemerintah akan memberikan dampak pada upaya perubahan dalam upaya mewujudkan outcome yang paling akhir (*ultimate outcome*)

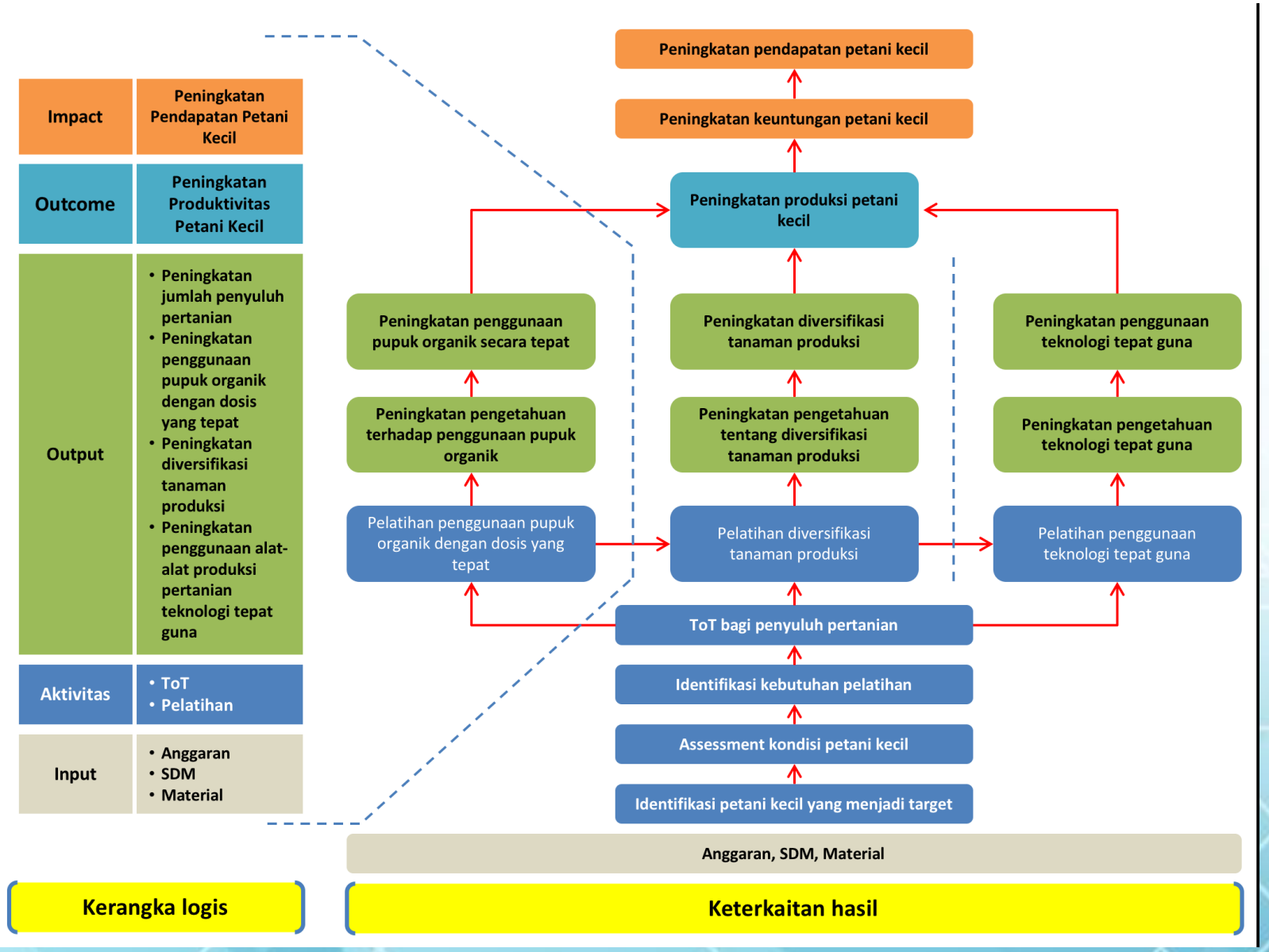

ROAD MAP DAN TANTANGAN RB

FOKUS PERUBAHAN RB KOTA MALANG

(berdasarkan Peraturan Walikota Malang Nomor 92 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Malang Nomor 20 Tahun 2015 Tentang **Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Malang Tahun 2015 - 2019**)

Prioritas Pembenahan Manajemen Pemerintahan Kota Malang	Sumber Daya Manusia
	Peraturan Perundang-undangan
	Pengawasan

Prioritas yang terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan	Pendidikan
	Kesehatan
	Kependudukan
	Perhubungan
	Pelayanan perizinan

Prioritas yang harus terus dipelihara	Mempertahankan opini WTP dari BPK
	Pemenuhan kewajiban bagi Pimpinan untuk menyerahkan LHKPN
	Penyediaan sarana pengaduan untuk penyampaian informasi indikasi terjadinya KKN
	Pendidikan gratis sampai tingkat SMP
	Pengembangan penyelenggaraan PTSP di Kelurahan
	Akreditasi pada seluruh Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)
	Pengembangan pelaksanaan *e-procurement* dalam pengadaan barang/jasa.

Quick Wins RB KOTA MALANG

(berdasarkan Peraturan Walikota Malang Nomor 92 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Malang Nomor 20 Tahun 2015 Tentang **Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Malang Tahun 2015 - 2019**)

1. **Pengembangan sistem informasi dan pelayanan kependudukan di Kelurahan berbasis *online***
2. **Penerapan PTSP secara efektif, murah, cepat dan mudah dengan pelayanan perizinan pararel**

VISI

Kota Malang Bermartabat

(Manusia Paripurna, Terdidik dan Berkharakter – Kota yang Lebut & Tegas – Aman & Nyaman – Penuh Kesaradan Positif)

MISI POLITIK

1. Meningkatkan akses pelayanan publik dasar bagi semua warga — Layanan publik dasar
2. Meningkatkan kualitas, aksesibilitas, dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan — Pendidikan & Kesehatan
3. Meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah — Produktivitas & Daya Saing
4. Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan terhadap masyarakat rentan, pengarustamaan gender, serta kerukunan sosial — Kesejahteraan & Perlindungan Sosial
5. Meningkatnya pembangunan infrastruktur dan daya dukung Kota yang terpadu dan berkelanjutan, tertib penataan ruang serta berwawasan lingkungan — Infrastruktur & daya dukung terpadu
6. Mewujudkan pelaksanaan reformasi birokrasi dan kualitas, pelayanan publik yang profesional, akuntabel dan berorientasi pada kepuasan masyarakat — Reformasi Birokrasi
7. Meningkatkan kerukunan antar umat beragama dengan menjunjung tinggi keragaman budaya dan toleransi antar umat beragama — Kerukunan & keragaman Budaya

MISI RPJMD

1. **SDM** — Menjamin Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Layanan Dasar Lainnya Bagi Semua Warga
2. **EKONOMI** — Mewujudkan Kota Produktif dan Berdaya Saing berbasis Ekonomi Kreatif, Keberlanjutan dan Keterpaduan
3. **SOSIAL** — Mewujudkan Kota yang Rukun dan Toleran berasaskan Keberagaman dan Keberpihakan terhadap Masyarakat Rentan dan Gender
4. **PEMERINTAHAN** — Memastikan Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah yang Tertib Hukum, Profesional dan Akuntabel

#Prioritas MISI 1

PRIORITAS PENDIDIKAN:

1. Pendidikan Kharakter sejak Usia Dini;
2. GRAB → Gratis Belajar 12 tahun bagi siswa tidak mampu;
3. Beasiswa Perguruan Tinggi untuk Pelajar (Warga Malang) yang berprestasi;
4. Kualitas tenaga pendidik unggul dengan Uji Kompetensi Guru >75;
5. Kualitas dan Kesejahteraan Guru (Tunjangan Guru, Kepsek, dan tenaga pendidik berbasis kinerja);
6. Rotasi Guru dan Kepsek dalam rangka pemerataan kualitas Pendidikan;
7. Upgrade Sarana Pendidikan;

PRIORITAS KESEHATAN:

1. Universal Health Coverage (UHG) - 100% Warga Kota Malang mendapat BPJS, warga tidak mampu ditanggung Pemkot;
2. Upgrade Kualitas Layanan Puskesmas;
3. Unit Layanan Kesehatan 24 Jam, lengkap dengan dokter jaga dan perawat di setiap kelurahan;
4. JAMPERSAL 1 Juta Rupiah;
5. Ambulan Gratis tiap Kelurahan, penambahan 100 armada dengan waktu tunggu 15 menit;
6. Prefentif dan Promotif Kesehatan masyarakat dan kualitas hidup pasien terminal melalui peran aktif dokter keluarga;

PRIORITAS LAYANAN DASAR LAINNYA:

1. Menjaga stabilitas harga bahan pokok melalui operasi pasar;
2. Menjamin ketersediaan dan diversifikasi pangan;
3. Kemudahan akses perumahan bagi warga kelas menengah;
4. Subsidi bahan pangan bagi warga miskin desil 1 dengan target konsumsi daging 1,5 kg/bulan/anak;
5. Keberpihakan belanja ASN kepada pasar tradisional;

#Prioritas MISI 2

PRIORITAS EKONOMI:

1. Centra UMKM dan Ekonomi Kreatif (pemanfaatan ex-Ramayana dan ex-PDAM);
2. Revitalisasi pasar tradisional dan pasar modern berbasis pasar rakyat;
3. Memperbaiki sistem kelembagaan BUMD (finansial, pengawasan);
4. Menciptakan ekosistem kolaborasi dan kewirausahaan baru serta Penyediaan *co-working space* di 5 kecamatan;
5. Wisata Kreatif dan Wisata Halal: Wsata Haritage, Kampung Arema, Studio Trans, Museum al'Quran, Mall UMKM;

PRIORITAS INFRASTRUKTUR DAN SARPRAS:

1. Jalan lingkar luar Kota Malang;
2. Pengembangan sekitar Pintu Tol;
3. Kerjasama Malang Raya pengelolaan Sungai, dan Air Minum;
4. Percepatan rekayasa lalu lintas penanggulangan macet (Zero Macet);
5. Revitalisasi sistem drainasi untuk mengurangi banjir (Zero Banjir);
6. Sarana dan prasaran Kota yang ramah dan nyaman (Trotoar, Taman dan Jembatan);
7. Pengelolaan Kawasan pemukiman Daerah Aliran Sungai (Bedah Kampung-rumah, jalan, gang, saluran air, dll;
8. Integrasi sistem Angkutan Dalam Kota Malang;

PRIORITAS TATA RUANG:

1. Pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi baru;
2. Membentuk fungsi polisi tata ruang;
3. Pengembangan pola ruang perbatasan atar wilayah;
4. Penyederhadaan dan Perbaikan mekanisme perijinan;

PRIORITAS LINGKUNGAN HIDUP:

1. Pengelolaan dan Pemanfaatan sampah terpadu (zero waste) ;
2. Integrasi PAM dan PAL atas kebutuhan air dan pengelolaan limbah;
3. Pengeloaan IPAL di bangunan pemerintah, swasta dan rumah tangga berbasis komunal;
4. Pengelolaan polusi karbon kedaraan bermotor (zero carbon)

#Prioritas MISI 3

PRIORITAS PERLINDUNGAN SOSIAL:

1. Membangun Sarana Prasarana Sosial yang ramah terhadap penyandang difabel;
2. Pembangunan panti jompo terpadi berkonsep villa lansia diwilayah malang timur;
3. Membangun sistem distribusi bantuan social darurat;
4. Membangun sistem informasi penghubung warga yang ingin membantu anak kurang mampu dan berkebutuhan khusus;
5. Membina dan Memberdayakan PMKS untuk lebih produktif;
6. Penetertiban peredaran minuman berakohol dan tempat hiburan;

PRIORITAS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK:

1. RTH ramah perempuan dan anak;
2. Membangun sistem informasi pelaporan, pelacakan dan penindakan kasus kekerasan perempuan dan akan;
3. Penyiapan keluarga muda baru dengan konsep sekolah ibu;

PRIORITAS LINGKUNGAN DAN BUDAYA:

1. Pengembangan sistem pengamanan lingkungan dengan e-siskampling;
2. Membangun event-event kebudayaan yang mendidik sebagai salah satu destinasi wisata;
3. Penguatan forum dan peran tokoh-tokoh agama dan masyarakat;

PRIORITAS PEMBERDAYAAN MASYARAKT DAN KOMUNITAS:

1. Menyusun kalender event-event pemberdayaan komunitas sebagai destinasi edukasi dan wisata;
2. Pengembangan Kawasan pemberdayaan thematik;

#Prioritas MISI 4

PRIORITAS HUKUM:

1. Penyesaian sengketa hukum;
2. Harmonisasi Properda dengan Kebutuhan Pembangunan;
3. Sistem Pengaduan Pelanggaran Hukum

PRIORITAS KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN:

1. Struktur kelembagaan yang ramping dan tepat fungsi;
2. Penyempurnaan sistem perencanaan, penganggaran dan evaluasi pembangunan;
3. Pengembangan sistem layanan public yang cepat, mudah dan terintegrasi;
4. Penertiban pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
5. Pengelolaan sistem manajemen Aset untuk produktifitas;
6. Pengelolaan sistem keuangan yang bebas KKN dan Transparan;
7. Optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah;

PRIORITAS MANAJEMEN APARATUR:

1. Mengembangan sistem reward dan punishment kinerja aparatur;
2. Mambangun standar kompetensi dan dan peta kebutuhan kepegawaian secara professional;
3. Menjalankan talent poll untuk menyediakan kebutuhan jabatan structural yang professional;
4. Membangun budaya kerja yang berintegritas dan jiwa kepemimpinan yang tangguh;

PRIORITAS TEKNOLOGI INFORMASI:

1. Membangun sistem respon cepat dan monitoring pembangunan;
2. Membangun Big Data dan Pola pemanfatan secara Geo Spasial;
3. Mengintegrasikan sistem informasi manajemen pemerintahan yang terintegrasi;

INTEGRITAS PROFESIONAL INOVATIF PEDULI

DUKUNGAN REFORMASI BIROKRASI TERHADAP IMPLEMENTASI MISI RPJMD KOTA MALANG 2019-2023

Misi	Area Perubahan yang dibutuhkan	OPD Pendukung
Misi 1 Menjamin akses dan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya bagi semua warga		
Misi 2		

Outline Road Map Reformasi Birokrasi Pemda

	Ringkasan Eksekutif
	Berisi uraian singkat substansi Road Map reformasi birokrasi Pemerintah Daerah, yang mencakup gambaran kondisi saat ini, kondisi yang diharapkan, prioritas program, kegiatan, Quick Wins, anggaran, rencana penghematan yang diharapkan, rencana waktu pelaksanaan dan kriteria keberhasilan yang ditetapkan.
Bab I	Pendahuluan
	Menguraikan latar belakang perlunya disusun Road Map sebagai dasar perencanaan pelaksanaan reformasi birokrasi di pemerintah daerah. Secara umum dan ringkas mengurai isi dari Road Map reformasi birokrasi.

Bab II	**Gambaran Birokrasi Pemerintah Daerah**
	1. Gambaran Umum Birokrasi Pemerintah Daerah Menguraikan kondisi birokrasi pemerintah daerah saat ini dilihat dari 3 (tiga) hal terkait dengan capaian sasaran reformasi birokrasi nasional yaitu: pemerintahan bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, kualitas pelayanan publik, kapasitas dan akuntabilitas kinerja. Penguraian kondisi mencakup hal-hal yang sudah dicapai/sudah baik dan perlu terus dipertahankan atau ditingkatkan, dan hal-hal yang masih perlu disempurnakan.

Outline Road Map Reformasi Birokrasi Pemda

Bab II	**Gambaran Birokrasi Pemerintah Daerah**
	2. Kebutuhan/Harapan pemangku kepentingan Menguraikan gambaran profil birokrasi yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan.
	3. Permasalahan birokrasi pemerintah daerah **Menguraikan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh birokrasi pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan harapan para pemangku kepentingan.**
Bab III	**Agenda Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah**
	1. Fokus perubahan Reformasi Birokrasi **2. Sasaran** **3. Kegiatan-kegiatan** **3. Rencana Aksi**
Bab IV	**Monitoring dan Evaluasi**
Bab V	**Penutup**

Langkah-langkah umum

Identifikasi Kondisi Umum

mengidentifikasi kondisi saat ini, dilihat dari sasaran reformasi birokrasi, baik menyangkut hal-hal yang sudah dicapai/baik, hal-hal yang perlu diperbaiki dan harapan yang ingin dicapai oleh para pemangku kepentingan

Fokus Perubahan

1. Prioritas Pembenahan Manajemen Pemerintahan Daerah, yaitu prioritas yang dipilih dari delapan area perubahan
2. Prioritas Pemeliharaan untuk hal-hal yang sudah baik/maju, yaitu prioritas yang ditujukan untuk memelihara atau bahkan meningkatkan hal-hal yang sudah baik/maju, agar tidak terjadi kemunduran;
3. Prioritas Peningkatan Kualitas Pelayanan, yaitu prioritas yang ditujukan secara spesifik pada pelayanan publik yang langsung menyentuh kehidupan masyarakat.
4. Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
5. Prioritas Perubahan Pada Satuan Perangkat Daerah, yaitu prioritas perubahan yang dilakukan pada satuan perangkat daerah.

Langkah-langkah Umum

Penyusunan Rencana Aksi

↓

Penyusunan Dokumen Road Map

rencana aksi reformasi birokrasi untuk seluruh prioritas

Penyusunan rencana aksi dilakukan dengan berbagai acuan sebagaimana telah ditetapkan dalam masing-masing area perubahan. (lihat pedoman-pedoman yang telah ditetapkan untuk memberikan arahan dalam melaksanakan reformasi birokrasi dalam fokus delapan area perubahan)

SIAPA YANG BERKONTRIBUSI DAN APA YANG DILAKUKAN DALAM PELAKSAAN RB?

8 AREA PERUBAHAN

1 MENTAL APARATUR

2 PENGAWASAN

3 AKUNTABILITAS

4 KELEMBAGAAN

TIM RB

SELURUH OPD

- Quick WIN
- RENAKSI RB

TATALAKSANA 5

SDM ASN 6

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 7

PELAYANAN PUBLIK 8

INTEGRITAS PROFESIONAL INOVATIF PEDULI

No	Komponen Penilaian	SIAPA	AGENDA
A	Pengungkit		
1	Manajemen Perubahan	SEMUA SKPD DAN TIM RB	
2	Penataan Peraturan Perundangan-undangan	SEMUA SKPD DAN TIM RB	
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	TIM RB	
4	Penataan Tatalaksana	SEMUA SKPD	
5	Penataan Sistem Manajeman SDM	SEMUA SKPD DAN TIM RB	
6	Penguatan Akuntabilitas	TIM RB	
7	Penguatan Pengawasan	TIM RB	
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	SEMUA SKPD	
	Sub Total Komponen Pengungkit		
B	Hasil		
1	Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	SEMUA SKPD	
2	Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN	SEMUA SKPD	
3	Kualitas Pelayanan Publik	SEMUA SKPD	
	Sub Total Komponen Hasil		
	Sub Total Komponen Pengungkit		

TERIMA KASIH

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

Jl. Veteran No. 10, Jakarta Pusat, 10110
www.lan.go.id

INTEGRITAS PROFESIONAL INOVATIF PEDULI